

# THE HISTORY OF THE EXPANSION OF THE KOTO KAMPAR HULU SUB-DISTRICT KAMPAR DISTRICT

**Yulia Gustina<sup>\*</sup>, Drs. Ridwan Melay, M. Hum<sup>\*\*</sup>, Drs. Tugiman, MS<sup>\*\*\*</sup>**  
Yuliagustina101996@gmail.com, ridwanmelay@yahoo.com, Tugiman\_UNRI@gmail.com  
CP 082284690611

History Education Department  
Social Sciences Education Department.  
Faculty of Teacher Training and Education.  
Riau University

**Abstract:** *Koto Kampar Hulu was a new expanded Sub-district at 11 June 2010 based on the regulation of Kampar district number 2 year 2010, regarding to the change of the regulations at Kampar district number 22 year 2003, regarding to the forming of the Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja and Koto Kampar Hulu district. Koto Kampar Hulu has thousand villages. 5 local villages and an Ex-Transmigration vilage (transfer from XIII Koto kampar) with the names of villages as follows : Tanjung village, Tabing vlllage, Pongkai village (ex-transmigration), Gunun Malelo village, Sibiruang village, Bandur Picak village. The purposes of this study are 1) to find out the histoy of the expansion of Koto Kampar Hulu sub-disrict. 2) to finid out the fulfillment regional expansion requirements. 3) to find out the supporting and inhibiting factors in development of Koto Kampar Hulu sub-district expansion. 4) to find out the effects of expansion in Koto Kampar Hulu sub-disrict at education field. This research use qualitative method wih desciptive presentation. The result of this research show that Koto Kampar Hulu sub-district was a combination villages from XIII Koto Kampar sub-district which want their area to be devided with the aim of facilitating public to connect with the sub-district and to close the distance to the previous sub-district.*

**Key Words:** Sub-district expansion

# SEJARAH PEMEKARAN KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR

**Yulia Gustina<sup>\*</sup>.Drs. Ridwan Melay, M. Hum<sup>\*\*</sup>. Drs. Tugiman, MS<sup>\*\*\*</sup>**  
Yuliagustina101996@gmail.com. ridwanmelay@yahoo.com.Tugiman\_UNRI@gmail.com  
CP 082284690611

Program Studi Pendidikan Sejarah  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstak :** Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan kecamatan yang baru dimekarkan pada tanggal 11 juni 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 dan Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2010, tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 tentang pembentukan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja, dan Kecamatan Koto Kampar Hulu. Kecamatan Koto Kampar Hulu yang beribu Kota di Desa Tanjung dengan jumlah penduduk  $\pm$  22.829 Jiwa, yang terdiri 6 (enam) desa, 5 desa tempatan dan 1 desa Eks-Transmigrasi (pindahan dari XIII Koto Kampar) dengan nama-nama desa sebagai berikut: Desa Tanjung, Desa Tabing, Desa Pongkai (ex-trasmigrasi), Desa Gunung Malelo, Desa Sibiruang, Desa Bandur Picak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui sejarah pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu, 2) Untuk mengetahui pemenuhan persyaratan pemekaran daerah, 3) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perkembangan pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu, 4) Untuk mengetahui dampak pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu di bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pengajian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Koto Kampar Hulu awalnya hanyalah desa-desa gabungan dari Kecamatan XIII Koto Kampar yang menginginkan daerah mereka di mekarkan dengan tujuan mempermudah masyarakat berurusan dengan pihak Kecamatan dan memperdekat jarak tempuk ke Kecamatan Sebelumnya.

**Kata Kunci :** *Pemekaran Kecamatan*

## PENDAHULUAN

Pemekaran kecamatan merupakan salah satu upaya pemerintah kabupaten dalam melaksanakan kegiatan pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu diharapkan mampu memperkecil ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan yang baik sebelum pemekaran, masyarakat belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, hal ini di tandai dengan waktu layanan yang ukup lama, biaya yang tak sedikit dan kinerja aparatur yang sering mempersulit masyarakat, seperti datang telambat dan bolos pada jam kerja.

Pemekaran kecamatan terjadi disebabkan oleh aspirasi masyarakat yang menginginkan daerah nya mekar dan menjadi daerah yang maju dan berkembang. Namun pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu mengalami kendala dalam peletakan ibu kecamatan, yang mana ada dua desa yang di usulkan untuk letak dari kecamatan yaitu Desa Sibiruang dan Desa Tanjung, kedua desa ini sangat menginginkan letak kecamatan itu berada di desa mereka. Sibiruang menginginkan letaknya di desa mereka begitu juga sama halnya dengan Desa Tanjung.

Kedua desa ini memiliki peranan penting dalam pemekaran karena ada beberapa penilaian dari yang berhak menentukan dimana tempat untuk peletakan dari ibu kecamatan, dan akhirnya ibu kecamatan jatuh kepada Desa Tanjung maka mendengar letak Kecamatan berada di Desa Tanjung tentu masyarakat Sibiruang tidak terima mengapa harus jatuh kepada Desa Tanjung seharusnya desa merekalah yang berhak dalam peletakan ibu kecamatan. pada saat itu masyarakat Desa Sibiruang membuat surat protes kepada kabupten yang mana isi dari surat tersebut mereka mengatakan bahwa mereka menolak Desa Tanjung menjadi ibu kecamatan, akan tetapi surat mereka tidak bisa membuat letak dari ibu kecamatan beralih kepada desa mereka. Pada saat itu masyarakat Desa Sibiruang dan Desa Tanjung melakukan rapat, isi dari rapat itu masyarakat Sibiruang Protes dengan peletakan ibu kecamatan berada di Desa Tanjung, dan akhirnya dilakukan la berbagai sepakatan antara Desa Sibirung dan Desa Tanjung dan akhirnya masyarakat Sibiruang sepakat bahwa letak ibu kecamatan berada di Desa Tanjung dengan syarat fasilitas yang di berikan dari Kabupaten ke kecamatan harus di letakkan di Desa Sibiruang.

Selama sembilan tahun masyarakat sama-sama berjuang supaya daerah mereka bisa di mekarkan menjadi kecamatan baru yaitu dari kecamatan XIII Koto Kampar menjadi Koto Kampar Hulu. mulai dari mencari lokasi untuk Ibu kecamatan, lahan sekolah, lahan Puskesmas dan rumah Sakit. Semua lahan tidak di dapatkan dengan begitu saja, mayarakat membeli lahan itu dengan menggunakan anggaran Desa.

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan salah satu dari 9 (sembilan) kecamatan baru hasil pemekaran Kabupaten Kampar dan merupakan Pemekaran dari XIII Koto Kampar yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 dan Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2010, tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 tentang pembentukan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja, dan Kecamatan Koto Kampar Hulu. Kegiatan Pemerintahan dimulai setelah diresmikannya Kecamatan Koto Kampar

Hulu oleh Bupati Kampar pada tanggal 11 Juni Tahun 2010 yang ibu kecamatannya adalah Desa Tanjung.

Kecamatan Koto Kampar Hulu yang beribu Kota di Desa Tanjung dengan jumlah penduduk  $\pm$  22.829 Jiwa, yang terdiri 6 (enam) desa, 5 desa tempatan dan 1 desa Eks-Transmigrasi (pindahan dari XIII Koto Kampar) dengan nama-nama desa sebagai berikut:

1. Desa Tanjung.
2. Desa Tabing.
3. Desa Pongkai (ex-trasmigrasi).
4. Desa Gunung Malelo.
5. Desa Sibiruang.
6. Desa Bandur Picak.

Mata pencaharaian penduduk di Kecamatan Koto Kampar Hulu, mayoritas adalah dari sektor pertanian.

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui sejarah pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu.
2. Mengetahui pemenuhan persyaratan pemekaran daerah Kecamatan Koto Kampar Hulu.
3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perkembangan Pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu.
4. Mengetahui dampak Pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu.

## **Hasil Penelitian**

### **A. Sejarah Pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu**

Pada dasarnya pemekaran wilayah dilakukan untuk mengoptimal kan pelenyan pemerintah kepada masyarakat karena rentang kendali semakin dekat dan akan lebih efektif dan efisien serta akuntabilitas Pemerintah kepada masyarakat. Sejarah Kecamatan Koto Kampar Hulu dahulunya sebelum mekar menjadi Koto Kampar Hulu Namanya XIII Koto Kampar karena di kecamatan ini sudah terdapat 19 desa maka masyarakat Koto Kampar Hulu ingin membuat Kecamatan baru yaitu Kecamatan Koto Kampar Hulu yang mana masyarakat atau desa yang ingin memekarkan diri letanya di Hulu.

## 1. Aspirasi dan Musyawarah Masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu

Dalam rangka pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu, masyarakat sangat mendukung akan terwujudnya hal tersebut. Di Kecamatan Koto Kampar Hulu aspirasi masyarakat dalam memperjuangkan pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu ini didasarkan atas keputusan antara tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda lingkungan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Sebelum mekar Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan gabungan dari Kecamatan XIII Koto Kampar, desa yang bergabung di Kecamatan XIII Koto Kampar berjumlah 19 desa yang mana dari keseluruhan desa yang bergabung di kecamatan tersebut ada enam desa yang sekarang merupakan bagian dari Kecamatan Koto Kampar Hulu. Karena jumlah desa sudah banyak hal ini membuat beratnya tanggung jawab pemerintahan Kecamatan XIII Koto Kampar dalam mengurus urusan yang terkait dengan administrasi kependudukan dan pelayanan kepada masyarakat, tambah lagi kondisi jalan yang kurang baik, serta jarak tempuh menuju kecamatan induk lumayan jauh. Hal ini lah yang membuat masyarakat menginginkan pemekaran kecamatan baru. Supaya mempermudah mereka dalam berurusan dengan pemerintahan dan jarak yang di tempuh menuju kantor kecamatan sudah dekat dari desa mereka.

Keinginan untuk memekarkan wilayah Pemerintahan Kecamatan Koto Kampar Hulu sudah terjadi pada Tahun 2003 sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja, dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Melihat masyarakat yang begitu antusias maka diadakan musyawarah yang bertempat di Kantor Desa Tanjung. Melalui berita acara masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu tertuang, bahwa masyarakat telah sepakat rencana pemekaran kecamatan akan dipusatkan di Desa Tanjung dan nama Kecamatan diberi nama Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan Ibu Kotanya terletak di Desa Tanjung.

## 2. Usaha-usaha Masyarakat dalam Pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu

Keinginan dan usaha-usaha masyarakat untuk memekarkan diri menjadi sebuah kecamatan baru didasari oleh beberapa faktor. *pertama* tuntutan masyarakat yang sangat kuat di tingkat bawah untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dari pemerintahan kecamatan sebelumnya dengan cara memperpendek rentang kendali dan birokrasi yang harus dilalui dalam memperoleh pelayanan publik. karena sebelum mekar menjadi Kecamatan Koto Kampar Hulu pelayanan pemerintahan sebelumnya belum begitu baik serta rentang kendali menuju ke Kecamatan lumayan jauh. *Kedua* keinginan masyarakat dan pemerintahan setempat untuk mendapat kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah yang dimiliki daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. maka dari itu masyarakat berusaha supaya daerah mereka bisa di mekarkan menjadi kecamatan baru supaya mereka bisa mengelolah sumber daya alam yang berada di daerah Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan tujuan mensejahterahkan masyarakat. *Ketiga* meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Ketidak puasan masyarakat akan layanan pemerintah Kecamatan Koto Kampar Hulu yang diberikan oleh kecamatan induk yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar pada saat itu, membuat masyarakat semakin yakin dan bertekad untuk membentuk kecamatan baru di daerah Kecamatan Koto Kampar Hulu.

## B. Pemenuhan Persyaratan Pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu

Dari segi tujuan yang ingin dicapai dari adanya pemekaran kecamatan terlihat bahwa Pemerintah Kecamatan Koto Kampar Hulu melihat kebijakan Pemerintah sebagai bentuk perhatian daerah otonom terhadap wilayah yang berdasarkan persyaratan teknis layak untuk dimekarkan demi kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah. Disamping itu kebijakan pemekaran akan di mungkinkan sekali terjadi perubahan dalam hal pelayanan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik masyarakat daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dikatakan bahwa Kecamatan Koto Kampar Hulu sudah memenuhi syarat untuk bisa dimekarkan.

- 1) Dasar pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja Dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.
- 2) Berdasarkan Jumlah penduduk, Luas wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan, seperti disajikan pada tabel 03 yaitu:

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan luas dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Koto Kampar Hulu menurut Desa Tahun 2010**

No	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Desa Tanjung	42,80	3.748	88
2	Desa Tabing	170,20	1.495	9
3	Desa Pongkai	7,04	701	100
4	Desa Gunung Malelo	203,50	4.633	23
5	Desa Sibiruang	59,37	3.537	60
6	DesaBandur Picak	200,40	2.522	13
<b>Jumlah total</b>		482,93	16.636	34

Sumber : Dokumen Kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2010

Berdasarkan data pada Tabel 03 yaitu:

- a. Jumlah penduduk di Kecamatan Koto Kampar Hulu berjumlah 16,636 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri jumlah penduduknya minimal 7.500 Jiwa maka dari jumlah penduduk Kecamatan Koto Kampar Hulu sudah layak dimekarkan.
- b. Luas wilayahnya Kecamatan Koto Kampar Hulu 482,93 Km<sup>2</sup> sedangkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri luas wilayahnya 10 Km<sup>2</sup> berarti untuk luas wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu sudah layak dimekarkan
- c. Untuk jumlah desa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri berjumlah 4 Desa/Kelurahan. Sedangkan jumlah desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu desanya berjumlah 6 desa , dari jumlah tersebut maka Kecamatan Koto Kampar Hulu layak dimekarkan.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemekaran Kecamatan Koto kampar Hulu.**

#### **1. Faktor Pendukung**

Disini penulis akan mengungkapkan beberapa faktor pendukung untuk meningkatkan status Kecamatan Koto Kampar Hulu menjadi sebuah kecamatan baru, diantaranya adalah :

- a. Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki sumber daya alam yang potensial. Potensi sumber daya alam tersebut yaitu dari sektor Pertanian, perkebunan, perdagangan dan peternakan.
- b. Sektor pertanian dan Perkebunan Kecamatan Koto Kampar Hulu berkembang dengan baik dan merupakan sumber pendapatan utama Kecamatan Koto Kampar Hulu saat di mekarkan.
- c. Kependudukan berperan dalam faktor Pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu. Perkembangan suatu Daerah sendiri merupakan kebutuhan warga dan keinginan yang selalu berkembang sehingga memungkinkan munculnya otonom baru.
- d. Untuk mempermudah urusan masyarakat menuju ke kecamatan.
- e. kesiapan masyarakat dan keinginan masyarakat dalam memekarkan kecamatan.

Masyarakat sangat menginginkan pemekaran kecamatan apabila letak kecamatan sudah berada di daerah maka urusan mereka akan terasa lebih muda dengan pihak Kecamatan ketika kecamataman berada di XIII Koto Kampar Hulu mereka harus menempuh perjalanan 1 Jam menuju kantor kecamatan dan jalan yang mereka tempuh berlobang-lobang dan berbatu belum lagi biaya yang akan mereka keluarkan untuk membeli minyak serta tenaga. Hal inilah yang mnyebabkan masyarakat menginginkan

Pemekaran Kecamatan, bisa dilihat setelah pemekaran terjadi masyarakat sudah merasakan kemudahan dalam berurusan dengan Pemerintahan kecamatan serta pembangunan dan proses transportasi menuju Kecamatan Koto Kampar Hulu sudah bisa dikatakan mulai membaik dan tidak belobang-lobang serta berbatu lagi.

Dengan adanya faktor pendukung tersebut maka Kecamatan Koto Kampar Hulu semakin di tuntut untuk meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.

## **2. Faktor Penghambat**

Kecamatan Koto Kampar Hulu yang dalam meningkatkan statusnya menjadi Kecamatan baru, tentu ada hambatan-hambatan yang dilaluinya, sehingga untuk menuju pemekaran kecamatan baru harus mwemakan waktu, walaupun dalam prosesnya waktu yang diperlukan memakan waktu yang lama. Adapun faktor penghambat Pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu antara lain :

- a. adananya perbedaan kaum elite politik.
- b. Susunan tata ruang kecamatan belum tumbuh sebagaimana layaknya kecamatan pada saat itu.
- c. Prasarana pemerintahan fisik yang kurang seperti kantor belum di bangun.
- d. kesepahaman masyarakat dalam peletakan ibu kecamatan.

Sebagai harapan utama otonomi daerah adalah terlaksananya tugas-tugas pemerintahan dengan baik, melalui pemekaran daerah maka hubungan antara aparatur pemerintahan dan masyarakat semakin dekat, dan aparatur itu sendiri semakin mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembinaan bangsa serta memberi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena hubungan pemerintah masyarakat semakin pendek serta perencanaan pembangunan akan semakin sedikit.

## **D. Dampak Pemekaran di Bidang Pendidikan**

### **1. Dampak Positif di bidang pendidikan**

- a. Memperpendek jangkauan pelayanan sehingga masyarakat lebih mudah berurusan dengan pemerintahan.
- b. Memperpendek rentang kendali dalam berurusan dengan pemerintahan kecamatan.
- c. Terbentuknya lapangan kerja baru pada Kecamatan yang dimekarkan.
- d. Ketersediaan fasilitas pendidikan Sekolah, Kantor, Perpustakaan lebih banyak dibangun pasca pemekaran sehingga masyarakat lebih mudah mengakses dan menjangkaunya.
- e. Dari pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang awalnya tidak berkecukupan dengan adanya pemekaran sudah mulai tercukupi contohnya sudah mulai di perbanyak buku di perpustakaan sekolah dengan bantuan pemerintah.

## **2. Dampak Negatif**

- a. Belum tersedianya fasilitas transportasi umum untuk mengantar siswa menuju kesekolah.
- b. Sebagian Keadaan jalan dikecamatan Koto Kampar Hulu masih berupa tanah yang hanya bisa dilewati pada waktu tertentu saja.
- c. Terbatasnya jumlah guru khususnya untuk pelajaran bahasa asing.
- d. Kurangnya bahan untuk melakukan praktek di laboratorium IPA.
- e. Terbatasnya jumlah komputer yang menyebabkan siswa harus bergantian menggunakan komputer dalam proses praktek belajar ilmu komputer.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tentang pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki latar belakang yaitu besarnya peran masyarakat yang menginginkan pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu. Masing-masing perwakilan dari masyarakat mengirimkan aspirasi mereka agar Kecamatan Koto Kampar Hulu segera di mekarkan.
2. Pemekaran kecamatan memberikan pengaruh positif terhadap persepsi masyarakat tentang pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Setelah terjadi pemekaran tingkat pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu menjadi lebih baik dan meningkat.
3. Pemekaran kecamatan memberikan pengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang perkembangan desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Perkembangan mencakup tingkat tingkat produksi pertanian yang semakin meningkat akibat pengelolaan yang baik, keadaan insfrastruktur yang menjadi lebih baik, serta meningkatnya jumlah lapangan kerja yang mulai bertambah.
4. Pemekaran wilayah yang telah melewati perjalanan panjang dengan memperhatikan luas wilayah, kepedudukan dan potensi daerah yang menjadi persyaratan pemekaran kecamatan serta tujuan awal pemekaran yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

## Rekomendasi

Dari uraian diatas penulis menyarankan:

1. Perlu adanya kajian dan penelitian mendalam tentang sejarah pemekaran Kecamatan Koto Kampar hulu agar banyak orang yang mengetahui bagaimana proses terjadinya pemekaran kecamatan di Koto Kampar Hulu.
2. Perlunya tindakan pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan di Kecamatan Koto Kampar Hulu agar dapat berkembang lebih pesat lagi dari sebelumnya.
3. Masyarakat sangat diharapkan berperan membantu membangun dalam membangun Kecamatan Koto Kampar Hulu bersama. Saling mendukung dan bekerjasama terhadap inovasi baru para pemerintah daerah akan membuat pembangunan dapat berjalan dengan baik. Diharapkan pula bbagi masyarakat agar dapat memanfaatkan lahan pertaanian yang ada, serta lestnian yang ada, serta lestarikan potensi alam Kecamatan Koto Kampar Hulu sehingga tidak di sia-siakan apa yang dianugerakan Allah untuk Kecamatan Koto Kampar Hulu.
4. Pemerintahan kecamatan hendaknya mampu menggali potensi dari desa-desa yang bergabung di Kecamatan Koto Kampar Hulu agar kiranya menjadi ciri khas tersendiri sehingga ada perhatian lebih dari pemerintah kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*. PT Raja Grasindo Persada. Jakarta.
- Abdurrahman Dudung. 2007. *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Sarana Utama. Jakarta.
- Fauzy Rizal, 2011. *Studi Kelayakan Teknis Garut Selatan Sebagai Kabupaten Baru Dengan Bantuan Aplikasi Perangkat Lunak*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kansil. 1991. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Kevin Reza, 2017. *Sejarah Pemekaran Kabupaten Tebo Provpinsi Jambi (1999-2015)*. Pendidikan sejarah, FKIP, Universitas Riau.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pemeentukan kecamatan Nomor 4 Tahun 2000.

- Lexi Meleong. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosada Offset. Bandung.
- Manan, Bagir. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum UII. Yogyakarta.
- Makaganza, H.R. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*. FUSPAD. Yogyakarta.
- Mardiasno. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT Grasindo. Jakarta.